



PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

# 2024 RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PARIWISATA  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Tebau Nunggu Nomor 2, Kota Kendari  
Telepon (0401) 3216643  
Faksimile (0401) 3127435

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan periode satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun dalam rangka:

- a. Mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, yang diturunkan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai upaya pengembangan kepariwisataan Sulawesi Tenggara tahun 2024.
- b. Sebagai acuan bagi semua tingkatan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengaplikasikan kebijakan dan strategi maupun program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan; dan
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setelah melewati proses penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) dan beberapa kali pendampingan penyusunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses – proses tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun untuk pengaplikasiannya, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 nantinya diharapkan mampu menjawab isu – isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Wassalam.**

Kendari, Mei 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**H. BELL.S.E.,M.Si**  
NIP. 19800104 2008031 002

# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	38
3.3 Program dan Kegiatan.....	43
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD .....	16
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan .....	30
Tabel 3.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenparekraf.....	35
Tabel 3.2	Target Indikator Kinerja Urusan Daerah .....	36
Tabel 3.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sultra .....	39
Tabel 3.4	Strategi dan Arah Kebijakan .....	40
Tabel 3.5	Tujuh Destinasi Wisata Prioritas Penyangga KSPN Wakatobi.....	41
Tabel 3.6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	45
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terbentuknya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan instansi dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas pokok dan bertanggungjawab langsung melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD pada khususnya serta pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan

terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Proses dan tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah  
Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- c. Penyusunan Agenda Kerja  
Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.
- d. Pengumpulan Data dan Informasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;

- 2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya menyusun Renja SKPD yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Tahun 2024.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Prov. Sultra mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sultra;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Pemendagri No. 54 Tahun 2010;
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-undang No. 33 Tahun 2010 Tentang Perfilman
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
13. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
18. Perpres Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataaan;
19. Inpres No.6 Tahun 2009 Tentang Ekonomi Kreatif;
20. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Permenparekraf tentang Standar Usaha Pariwisata (Hotel, Kafe, Diskotik, Villa, Restoran, Spa, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Impresariat/Promotor, Taman Rekreasi, MICE, Rumah Makan, Arung Jeram, Arena Permainan, Pondok Wisata, Angkutan Jalan Wisata, Usaha Perjalanan Wisata, Kawasan Pariwisata, Kelab Malam, Bar, Jasa Boga, Konsultan Pariwisata, Wisata Selam).
23. Permenparekraf No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata;
24. Permenparekraf No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 – 2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026.
29. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.
30. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 310 Tahun 2022 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **b. Tujuan**

Dokumen Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program – program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada RAPBD tahun 2024;
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata tahun 2024; dan
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT**  
**DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Pariwisata sampai dengan Tahun 2023 dapat di uraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara**

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
X	XX	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%			
X	XX	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	309 Dokumen	109 Dokumen	103 Dokumen	109 Dokumen	109 Dokumen	106%	## Dokumen	321 Dokumen	104%			
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	107%	90 Orang/Bulan	282 Orang/Bulan	104%			
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%			
X	XX	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	100%			
X	XX	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39 Laporan	10 Laporan	13 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	162%	13 Laporan	44 Laporan	113%			
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	67%			
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	10 Orang	12 Orang	20 Orang	20 Orang	167%	12 Orang	42 Orang	117%			

X	XX	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	147	Laporan	49	Laporan	16	Laporan	48	Laporan	300%	50	Laporan	147	Laporan	100%
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	100%
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	15	Paket	100%
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	5	Paket	100%
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	2	Paket	5	Paket	4	Paket	80%	4	Paket	10	Paket	100%
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	6	Paket	100%
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	12	Dokumen	1	Dokumen	12	Dokumen	1200%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	1200%	12	Laporan	36	Laporan	100%
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	1200%	12	Laporan	36	Laporan	100%
X	XX	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	30	Unit	22	Unit	10	Unit	8	Unit	80%	2	Unit	32	Unit	107%
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	0	Unit	1	Unit	100%
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	2	Paket	100%
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	18	Unit	5	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	18	Unit	120%
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	3	Unit	4	Unit	7	Unit	175%	1	Unit	11	Unit	92%
X	XX	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	108	Persen	36	Persen	36	Persen	36	Persen	100%	36	Persen	108	Persen	100%
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
X	XX	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	162	Unit	54	Unit	55	Unit	55	Unit	100%	53	Unit	162	Unit	100%
X	XX	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	100%
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	100%	17	Unit	51	Unit	100%
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	68	Unit	23	Unit	23	Unit	23	Unit	100%	22	Unit	68	Unit	100%
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	2	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	2	Unit	7	Unit	100%



3	26	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>JUMLAH USULAN PRODUK EKRAF YANG DIFASILITASI /MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>														
3	26	04	1,01		<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi</b>	<b>17</b>	<b>Laporan</b>	<b>17</b>	<b>Laporan</b>	<b>6</b>	<b>Laporan</b>	<b>27</b>	<b>Laporan</b>	<b>450%</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>48</b>	<b>Laporan</b>	<b>282%</b>
3	26	04	1,01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	15	Laporan	15	Laporan	5	Laporan	26	Laporan	520%	3	Laporan	44	Laporan	293%
3	26	04	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	200%
3	26	04	1,02		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan</b>	<b>4</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>Dokumen</b>	<b>225%</b>
3	26	04	1,02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	4	Laporan	5	Laporan	500%
3	26	04	1,02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	4	Dokumen	133%
3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>JUMLAH SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIBINA</b>														
3	26	05	1,01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan</b>	<b>600</b>	<b>Orang</b>	<b>600</b>	<b>Orang</b>	<b>300</b>	<b>Orang</b>	<b>320</b>	<b>Orang</b>	<b>107%</b>	<b>##</b>	<b>Orang</b>	<b>###</b>	<b>Orang</b>	<b>187%</b>
3	26	05	1,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	300	Orang	300	Orang	100	Orang	160	Orang	160%	##	Orang	560	Orang	187%
3	26	05	1,01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150	Orang	150	Orang	50	Orang	160	Orang	320%	50	Orang	360	Orang	240%
3	26	05	1,01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	150	Orang	150	Orang	50	Orang	0	Orang	0%	50	Orang	200	Orang	133%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai tugasnya merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di pariwisata, sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 73 Tahun 2016.

Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam salah satu Kawasan destinasi wisata prioritas nasional yang terdapat di Wakatobi. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) destinasi pariwisata penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi yang dikenal dengan *Seven Wonders*, yang disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 310 Tahun 2022 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan strategis Pariwisata Nasional Wakatobi, yakni :

1. Koridor Wisata Teluk Kendari – Toronipa – Labengki;
2. Benteng Keraton Wolio – Lambusango;
3. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai;
4. Pulau Padamarang;
5. Kawasan Karts Pulau Muna;
6. Kawasan Karts Matarombeo; dan
7. Kawasan Mangrove Buton Utara.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar melakukan analisis kinerja pelayanan dengan tujuan untuk menghasilkan analisis kinerja yang lebih akurat berdasarkan pelaksanaan tiap kegiatannya. Selanjutnya, memperhatikan tugas dan kewenangan dinas selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi:

1. Rata – rata belanja wisatawan ;
2. Kontribusi sektor akomodasi & makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara.

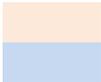
Sedangkan IKK Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Rata – rata lama tinggal wisatawan ;
2. Jumlah kunjungan wisatawan ;
3. Jumlah usulan produk ekonomi kreatif yang difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina.

Mempedomani Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2024 – 2026, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melalui beberapa upaya. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2018 – 2023 dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 sehingga terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk lebih jelasnya tentang kinerja OPD secara jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Lokasi	2						
2	Persentase Tingkat Hunian Hotel	Persen	40,52						
3	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	2.481.632	8.720.256	1.927.142	2.539.976	4.832.290	1.232.915	
4	Rata-rata Lama tinggal Wisatawan	Hari	2,9	3,57	3,48	7,47	7,54	1,7	
5	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	1.030.411.500	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000	1.102.500.000	
6	Rata - rata Belanja Wisatawan	Rupiah							3.567.769
7	Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara	Persen							1,99

**IKU 2018** 

**IKU 2019-2023** 

**IKU 2024-2026** 

Sumber : Dinas Pariwisata Prov. Sultra Tahun 2023

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat, berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, peningkatan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain.

Berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026, secara umum permasalahan kepariwisataan dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan Pengembangan SDM dan Kelembagaan

- a. Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas SDM pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- b. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan.
- c. Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan *sapta pesona* oleh stakeholder kepariwisataan, pihak terkait maupun masyarakat.
- d. Belum optimalnya kemitraan dunia pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan *stakeholder* pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e. Masih rendahnya hubungan kemitraan/ kerjasama pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luar daerah maupun dari luar negeri.
- f. Banyaknya asosiasi dan organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah.
- g. Masih rendahnya pelaksanaan/ penerapan sertifikasi standarisasi kualitas SDM maupun kelembagaan kepariwisataan.

## **2. Permasalahan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata**

- a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Sulawesi Tenggara belum optimal.
- b. Masih terbatasnya dan masih rendahnya investasi di bidang pariwisata.
- c. Tidak semua kelompok sadar wisata memiliki pengetahuan dalam mengelola destinasi wisata. Hal ini berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata dan kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata.
- d. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata baru.
- e. Belum memadainya infrastruktur penunjang pariwisata yang berkualitas.
- f. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.
- g. Kurangnya daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan industri pariwisata.
- h. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala mikro, kecil dan menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan.
- i. Standarisasi produk maupun layanan dari industri wisata masih minim dan memerlukan perhatian khusus.

## **3. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

- a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik *online* *offline*

kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Sulawesi Tenggara.

- c. Kegiatan promosi wisata masih berjalan parsial, masih terbatasnya *event-event* yang berskala nasional dan internasional, serta kemasan *event* yang kurang menarik.
- d. Belum semua destinasi wisata Sulawesi Tenggara memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
- e. Kurang optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (*Asosiasi Travel Agent*) dalam mempromosikan pariwisata Sulawesi Tenggara.
- f. Belum adanya *branding* kepariwisataan yang paten dan kuat untuk meningkatkan citra positif kepariwisataan Sulawesi Tenggara.
- g. Penguatan promosi pariwisata daerah baik melalui kerjasama media lokal dan media nasional perlu ditingkatkan.
- h. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan *desk analysis* yang mengambil dari BPS dan sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

#### **4. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kreatif**

- a. Kurangnya apresiasi kreativitas lokal, kurang konektivitas jalur distribusi nasional dan pasar luar negeri, belum diterapkannya sistem pembayaran *online*, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta.
- b. Masih rendahnya kesadaran industri kreatif untuk melindungi karyanya serta membutuhkan waktu untuk mendapatkan perlindungan HKI.
- c. Belum terwujudnya ekonomi kreatif yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan
- d. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

- e. Belum adanya kerjasama dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai lingkungan strategis yang menjadi isu-isu strategis dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal dan eksternal yang dipastikan dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Lingkungan strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

**Tabel 3.3**  
**ANALISIS S.W.O.T DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

FAKTOR	PENDORONG	PENGHAMBAT
<b>Internal</b>	<p><b><i>Strength</i> (Kekuatan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya regulasi sebagai landasan operasional, salah satunya regulasi tentang penetapan destinasi wisata prioritas Sulawesi tenggara (<i>seven wonders</i>).</li> <li>- Memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik itu wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan lain – lain.</li> <li>- Sulawesi Tenggara memiliki letak yang strategis.</li> </ul>	<p><b><i>Weakness</i> (Kelemahan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.</li> <li>- Belum menerapkan teknologi dan sarana informasi secara optimal.</li> <li>- Belum memiliki <i>branding</i> pariwisata untuk menciptakan citra positif pariwisata dalam menarik minat berkunjung wisatawan.</li> <li>- Sarana prasarana dan aksesibilitas yang kurang memadai di kawasan destinasi prioritas (<i>seven wonders</i>).</li> <li>- Masih kurangnya produk kreatif yang memiliki HKI.</li> </ul>

Eksternal	<b>Opportunities (Peluang)</b>	<b>Threat (Ancaman)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi daya tarik wisata Sulawesi Tenggara yang beragam.</li> <li>- Sulawesi Tenggara masuk dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.</li> <li>- <i>Event</i> pariwisata termasuk dalam Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN).</li> <li>- Desa Wisata termasuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia.</li> <li>- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tersebar di desa – desa wisata Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil.</li> <li>- Pariwisata tidak termasuk dalam sektor unggulan Sulawesi Tenggara.</li> <li>- Kondisi pasca pandemi yang masih belum pulih dalam mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan di Sulawesi Tenggara.</li> </ul>

Tujuan dan sasaran akan terlaksana jika didukung oleh sasaran dan kebijakan yang tepat. Strategi pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Terwujudnya Peningkatan Daya Tarik Wisata;
2. Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
3. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
5. Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Setiap arah kebijakan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat prioritas sebagai titik berat dalam perencanaan setiap tahun. Untuk melaksanakan strategi tersebut di atas diperlukan arah kebijakan pembangunan yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
2. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi
3. Meningkatkan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
4. Meningkatkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

5. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana Kota Kreatif;
6. Meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
9. Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah;
10. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
11. Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah;
12. Meningkatkan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
13. Meningkatkan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
14. Meningkatkan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah;
15. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
16. Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
17. Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan harus berpijak kepada kebijakan pemerintah provinsi secara umum, yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.

Review rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(5)		(6)			(5)		(6)			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Kendari</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>13.219.390</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Kendari</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>13.219.390</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	3 Dok	252.386	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	3 Dok	252.386	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	20.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	20.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	227.136	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	227.136	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.250	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dok	8.352.535	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dok	8.352.535	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Org/Bln	8.174.662	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Org/Bln	8.174.662	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	172.623	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	172.623	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	5.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	5.250	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dok	53.433	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dok	53.433	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	53.433	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	53.433	

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4 Lap.</b>	<b>132.010</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4 Lap.</b>	<b>132.010</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95 Pkt	68.141	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95 Pkt	68.141
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dok	15.967	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dok	15.967
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Org	31.935	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Org	31.935
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	15.967	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	15.967
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50 Lap.</b>	<b>1.703.964</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50 Lap.</b>	<b>1.703.964</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	12.492	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	12.492
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Pkt	400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Pkt	400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	59.055	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	59.055
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pkt	68.141	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pkt	68.141
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	20.489	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	20.489
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	68.787	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	68.787
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	575.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	575.000

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>19 Unit</b>	<b>1.615.527</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>19 Unit</b>	<b>1.615.527</b>	
Pengadaan Mebel	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Pkt	100.000	Pengadaan Mebel	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Pkt	100.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	598.127	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	598.127	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	478.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	478.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	289.400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	289.400	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>25 Lap.</b>	<b>373.651</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>25 Lap.</b>	<b>373.651</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	2.743	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	2.743	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	207.236	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	207.236	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	163.672	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	163.672	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>35 Unit</b>	<b>735.884</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kendari</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35 Unit</b>	<b>735.884</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	59.590	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	59.590	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	55.648	
Pemeliharaan Mebel	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	55.648	Pemeliharaan Mebel	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	50.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.646	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.646	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	520.000	

<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan</b>	<b>7,63 Hari</b>	<b>15.066.403</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan</b>	<b>7,63 Hari</b>	<b>15.066.403</b>
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola</b>	<b>2 Lok.</b>	<b>776.190</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola</b>	<b>2 Lok.</b>	<b>776.190</b>
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kendari	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lok.	776.190	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kendari	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lok.	776.190
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola</b>	<b>2 Lok.</b>	<b>13.781.314</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola</b>	<b>2 Lok.</b>	<b>13.781.314</b>
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lok.	230.685	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lok.	230.685
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dok.	204.750	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lok.	204.750
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dalam Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	13.006.629	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dalam Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	13.006.629
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dok.	89.250	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dok.	89.250
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Org	250.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Org	250.000
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Kendari/Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha</b>	<b>5 Industri</b>	<b>508.899</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Kendari/Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha</b>	<b>5 Industri</b>	<b>508.899</b>
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Lap.	200.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Lap.	200.000
Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Lap.	147.420	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Lap.	147.420
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	5 Usaha	161.479	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	5 Usaha	161.479

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	6,6 Orang Juta	4.087.091	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	6,6 Orang Juta	4.087.091
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah	10 Lap.	4.087.091	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah	10 Lap.	4.087.091
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dok.	264.359	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dok.	264.359
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Lap.	3.682.894	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Lap.	3.682.894
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dok.	139.838	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dok.	139.838
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Dalam Daerah/Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi/Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>1 Usulan</b>	<b>1.695.960</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Dalam Daerah/Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi/Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>1 Usulan</b>	<b>1.695.960</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi	4 Lap.	965.960	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi	4 Lap.	965.960
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan	2 Lap.	793.551	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Lap.	793.551
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Lap.	172.409	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kendari/Dalam Daerah/Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Lap.	172.409
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	7 Dok.	730.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	7 Dok.	730.000
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	100.000	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	100.000
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Produk	200.000	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Produk	200.000
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kendari	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dok.	200.000	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kendari	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dok.	200.000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dok.	30.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dok.	30.000
Pengembangan Sistem Pemasaran	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dok.	200.000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dok.	200.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	200 Org.	682.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	200 Org.	682.500
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	200 Org.	682.500	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	200 Org.	682.500
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Org.	155.925	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Org.	155.925
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Org.	155.925	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Org.	155.925
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Org.	56.700	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Org.	56.700
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Lap.	56.700	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Org.	56.700
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	40 Org.	133.400	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	40 Org.	133.400
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Org.	123.850	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kendari/Dalam Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Org.	123.850
				<b>34.751.344</b>					<b>34.751.344</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan di bidang pariwisata tidak terlepas dari peran serta segenap komponen masyarakat yang diformulasikan kedalam usulan dari Kabupaten dan Kota melalui Dinas yang membidangi pariwisata. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme Rapat Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilanjutkan dengan pemantapan pada Forum OPD serta ditindaklanjuti membawa usulan program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Nama Perangkat Daerah:** Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan Budaya	Desa Wisata Liambo, Kota Baubau	Jumlah Pelaku Usaha Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan Budaya yang Dibina	40	Orang	Terdaftar ADWI
2	Pelatihan Pengembangan Ekraf dan Pelatihan SDM Pokdarwis	Desa Lawela Selatan, Kabupaten Buton Selatan	Jumlah Pelaku Ekraf dan SDM Kelompok Sadar Wisata yang Dilatih	40	Orang	Terdaftar ADWI
3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Buton Tengah	Jumlah Pelaku Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	40	Orang	Data dukung siap
4	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Kabupaten Buton	Jumlah SDM Pengelola Desa Wisata yang Dilatih	80	Orang	Data dukung siap
5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Buton Utara	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dilatih	1	Kegiatan	Data dukung siap
6	Pendukung Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah	Kabupaten Buton Utara	Jumlah Pelaksanaan Event Pariwisata yang Difasilitasi	1	Kegiatan	Data dukung siap
7	Pembangunan Pendopo Objek Wisata Puncak Indah Kapu	Desa Wisata Sani - Sani, Kabupaten Kolaka	Jumlah Bangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata yang Dibangun	1	Unit	75 Besar ADWI 2023
8	Pembangunan <i>Tiny House</i> Objek Wisata Puncak Indah Kapu	Desa Wisata Sani - Sani, Kabupaten Kolaka	Jumlah Bangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata yang Dibangun	1	Unit	75 Besar ADWI 2023

9	Pelatihan Sumber Daya Pengelola Pariwisata	Kabupaten Kolaka Timur	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
10	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata di Desa Wisata	Kabupaten Kolaka Timur	Jumlah Sumber Daya Pariwisata di Desa Wisata yang Diberi Sosialisasi	40	Orang	Data dukung siap
11	Pelatihan Pelaku Industri Kreatif	Kabupaten Kolaka Utara	Jumlah Pelaku Industri Kreatif yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
12	Pendukung Pelaksanaan <i>Event</i> Pariwisata Daerah ( <i>Rock Climbing Camp &amp; Community</i> )	Kabupaten Konawe	Jumlah Pelaksanaan Event Pariwisata yang Difasilitasi	1	Kegiatan	Data dukung siap
13	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata	Kabupaten Konawe Utara	Jumlah SDM Kelompok Sadar Wisata yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
14	Pelatihan Manajemen <i>Homestay</i> /Pondok Wisata/Desa Wisata	Kabupaten Konawe Utara	Jumlah SDM Pengelola <i>Homestay</i> /Pondok Wisata/Desa Wisata yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
15	Penataan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung Kampung Wisata	Kota Kendari	Jumlah Unit Fasilitas Pendukung	13	Paket	SK Walikota Kendari
16	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Tenun	Kabupaten Muna Barat	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Tenun yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
17	Pelatihan Film, Videografi, dan Animasi Terintegrasi dengan Sertifikasi	Kabupaten Wakatobi	Jumlah Pelaku Industri Kreatif Sub Sektor Film, Videografi, dan Animasi yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
18	Pelatihan Penyusunan Paket Desa Wisata	Kabupaten Wakatobi	Jumlah SDM Pariwisata yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
19	Dukungan Penyelenggaraan <i>Event Wakatobi Wave</i>	Kabupaten Wakatobi	Jumlah Pelaksanaan Event Pariwisata yang Difasilitasi	1	Kegiatan	Event Prioritas Daerah
20	Dukungan Penyelenggaraan <i>Festival Content Creator Destinasi Wakatobi</i>	Kabupaten Wakatobi	Jumlah Pelaksanaan Event Pariwisata yang Difasilitasi	1	Kegiatan	Data dukung siap
21	Penyusunan Masterplan Geo Wisata Pulau Muna	Kabupaten Muna	Jumlah Dokumen Pendukung Kepariwisataaan yang Disusun	1	Dokumen	Telah dilaksanakan FGD dan Kajian Akademis
22	Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya ( <i>Anyaman Bambu</i> )	Kabupaten Muna	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya yang Dilatih	40	Orang	Data dukung siap
23	Pendukung Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah ( <i>Event Muna Fest</i> )	Kabupaten Muna	Jumlah Pelaksanaan Event Pariwisata yang Difasilitasi	1	Kegiatan	Data dukung siap
24	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Wisata	Kabupaten Konawe Kepulauan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Wisata yang Dilatih	30	Orang	Data dukung siap

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional menjadi dasar sinergitas dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Arah pembangunan nasional selama lima tahun dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Terdapat empat pilar dari RPJMN ke – IV tahun 2020 – 2024 yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Pariwisata berkaitan dengan pilar ke dua dan tiga, yaitu: *Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat* dan *Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh*. Keempat pilar RPJMN ke – IV tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan yang merupakan penerjemahan Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden. Tujuh Agenda Pembangunan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) diharapkan dapat berkontribusi pada Agenda 1, yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025, Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.”**

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan empat misi pengembangan, yaitu:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan misi pengembangan kepariwisataan tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf menetapkan sasaran strategis yang merupakan uraian dari tujuan strategis dalam mendukung Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat sebelas sasaran strategis yang dipetakan ke dalam empat perspektif BSC (*balance scorecard*). Perspektif pertama yaitu *stakeholder*, perspektif kedua yaitu *customer*, perspektif ketiga yaitu *internal process* dan perspektif keempat yaitu *learning and growth*. Penjelasan dari sasaran strategis Kemeparekraf/Baparekraf pada empat perspektif tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Perspektif *Stakeholder*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah; Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.

#### 2. Perspektif *Customer*

Pada perspektif ini, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki enam sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
- b. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
- c. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
- d. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
- e. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
- f. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

### 3. Perspektif *Internal Process*

Pada perspektif ini, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki tiga sasaran strategis, yaitu:

- a. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
- b. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

### 4. Perspektif *Learning and Growth*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah; Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Berkaitan dengan sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang bersinggungan dengan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.

Pada tahun 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan 4,5% untuk indikator kinerja kontribusi PDB sektor pariwisata. Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sasaran strategis yang sama dengan indikator kinerja kontribusi sektor akomodasi dan makan – minum pada PDRB Sulawesi Tenggara menargetkan 1,99% pada tahun 2024.

2. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan.

Salah satu dari dua indikator yang menyokong sasaran strategis tersebut adalah jumlah *spending* wisatawan mancanegara. Pada tahun 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar 1.345 (USD). Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sasaran strategis meningkatnya jumlah belanja wisatawan dan indikator kinerja rata - rata belanja wisatawan, menargetkan 3.567.769 (Rp) pada tahun 2024.

**Tabel 3.1**

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

NO.	SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	SS1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi						
	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5
2	SS3. Meningkatnya Kualitas dan Jumlah Wisatawan						
	Jumlah spending wisatawan mancanegara	USD	1166,67 - 1213,87	1.210	1.250	1.303	1.345

Sesuai hasil *desk* pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, dukungan daerah terhadap target nasional dapat disandingkan dalam Tabel 3.2 dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Kinerja Urusan Daerah**  
**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/**  
**Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target K/L	Target Prov. Sulawesi Tenggara	Keterangan
1	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	4,5	1,99	<p><b>A. Penjabaran Permasalahan Daerah:</b>  Kondisi dimana sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara belum menjadi sektor unggulan, menyebabkan Dinas Pariwisata kesulitan untuk mengakses data PDRB sektor pariwisata daerah. Data yang termuat pada dokumen rilis Badan Pusat Statistik (BPS) hanya memuat jumlah hotel bintang dan non bintang serta rata - rata lama menginap tamu. Kedua hal ini tentu saja tidak bisa dijadikan satu - satunya patokan dalam menghitung PDRB, sebagaimana yang kita ketahui sektor akomodasi dan makan - minum juga berperan penting dalam kontribusi perekonomian daerah. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata berencana melaksanakan koordinasi dengan BPS Sulawesi Tenggara dalam pendataan sektor akomodasi dan makan - minum.</p> <p><b>B. Masukan terhadap Kegiatan K/L:</b>  Diperlukan konsultasi mendalam bagi Dinas Pariwisata kepada Kemenparekraf/Baparekraf terkait kontribusi PDRB sektor pariwisata daerah.</p> <p><b>C. Catatan Lainnya:</b>  Dukungan kegiatan dalam rangka meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata, yaitu: 1. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana destinasi wisata, 2. Fasilitasi Standarisasi dan Usaha Pariwisata, 3. Pelaksanaan event pariwisata, 4. Bimtek pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1.500.000.000	6.666.000	<p><b>A. Penjabaran Permasalahan Daerah:</b> Sarana prasarana di destinasi wisata Sulawesi Tenggara yang belum optimal menjadi salah satu kendala dalam menarik wisatawan ke Sulawesi Tenggara. Pandemi Covid - 19 yang melanda Indonesia selama tiga tahun terakhir (2020 - 2022) menyebabkan banyaknya wisatawan nusantara yang ragu untuk melakukan perjalanan wisata jauh dari daerah asal mereka. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus melakukan pembenahan, baik dari sisi sarana prasarana maupun dari segi jaminan CHSE (<i>Cleanliness, Healthy, Safety and Environment Sustainability</i>) di destinasi - destinasi wisata.</p> <p><b>B. Masukan terhadap Kegiatan K/L:</b> Memetakan <i>market share</i> yang tepat berdasarkan potensi yang dimiliki daerah sehingga pengembangan destinasi dapat sesuai <i>market</i> yang dituju. <i>Market share</i> dimaksud nantinya akan menjadi patokan bagi daerah, tidak hanya untuk mengembangkan destinasi wisata, namun juga dalam memetakan jenis wisatawan berdasarkan potensi destinasi wisata masing - masing.</p> <p><b>C. Catatan Lainnya:</b> Dukungan kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yaitu: 1. Penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata daerah, 2. Partisipasi pameran pariwisata luar daerah dan luar negeri, 3. Pengembangan website dan media sosial sebagai sarana promosi, 4. Kerjasama TV Nasional.</p>
3	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Triliun Rp.	1.641	-	<p><b>A. Penjabaran Permasalahan Daerah:</b> Walaupun sektor ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara tergolong berkembang dengan telah dipetakannya sub sektor - sub sektor unggulan daerah, namun sampai sekarang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara belum menemukan formula yang tepat dalam melakukan perhitungan nilai tambah ekonomi kreatif daerah. Fokus pengembangan sektor ekonomi kreatif lebih menurus kepada pelaksanaan dan partisipasi <i>event</i> kreatif, perluasan pasar produk kreatif dan fasilitasi usulan produk kreatif yang diberi perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p><b>B. Masukan terhadap Kegiatan K/L:</b> Diperlukan fasilitasi kegiatan penghitungan nilai tambah ekonomi kreatif bagi Pemerintah Daerah oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Kegiatan yang dilaksanakan haruslah bersifat bimbingan teknis yang membutuhkan pendalaman materi, arahan dan bimbingan dari Kementerian terkait, tidak hanya sekedar sosialisasi. Peserta kegiatan juga tidak hanya berasal dari Pemerintah Provinsi, namun juga dari Kabupaten/Kota, serta Instansi terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif daerah.</p> <p><b>C. Catatan Lainnya:</b> Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak terkait, yaitu: 1. Perda Prov. Sulawesi Tenggara No. 1 Tahun 2020 tentang Pengembagan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 507 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Sulawesi Tenggara, 3. SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 508 Tahun 2022 tentang Susunan Pengurus dan Uraian Tugas Pengurus Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif, 4. MoU Tahun 2022 antara Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

### a. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah dengan fokus pengembangan pada Destinasi Wisata Prioritas Provinsi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pembelanjaan (*spending*) wisatawan;
- Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya – upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri dan kawasan pariwisata;
- Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif daerah berbasis kepariwisataan;
- Meningkatkan pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing;
- Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024; dan
- Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.

### b. Sasaran

Sesuai dengan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026; “Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat” dan “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”, maka implemementasi pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Tahun 2024 - 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022*)	Target Tahunan			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan-Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara	Persen	1,94	1,99	2,09	2,19	2,19
2	Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan	Rata - Rata Belanja Wisatawan	Rupiah	3.497.813	3.567.769	3.639.125	3.711.907	3.711.907

*\*) Data Tahun 2023 untuk sementara belum tersedia*

**c. Strategi**

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam Tabel 3.4 dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.	Meningkatkan jumlah belanja wisatawan.	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana Kota Kreatif.
			Terwujudnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.	Terwujudnya peningkatan daya tarik wisata.	Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata provinsi
			Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi Meningkatkan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Meningkatkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Selain arah kebijakan yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan khusus pada Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi. Arah kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 310 Tahun 2022 tentang Penetapan Destinasi Wisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024).

**Tabel 3.5**  
**7 (Tujuh) Destinasi Wisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi**

NO	DESTINASI WSATA PRIORITAS	LOKASI	KETERANGAN
1	Koridor Wisata Teluk Kendari – Toronipa - Labengki	Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Kepulauan	Tematik Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensif, dan Pameran Serta Wisata Bahari
2	Benteng Keraton Wolio - Lambusango	Kota Bau-bau, Kab. Buton dan Kab. Buton Selatan	Tematik Wisata Sejarah Budaya dan Wisata Alam
3	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana dan Kab. Konawe	Tematik Wisata Alam
4	Pulau Padamarang	Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara dan Kab. Kolaka Timur	Tematik Wisata Alam dan Wisata Bahari
5	Kawasan Karts Pulau Muna	Kab. Muna, Kab. Muna Barat dan Buton Tengah	Tematik Wisata Geologi dan Wisata Bahari
6	Kawasan Karts Matarombeo	Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe	Tematik Wisata Alam dan Sejarah
7	Kawasan Mangrove Buton Utara	Kab. Buton Utara	Tematik Wisata Alam

Tujuh Destinasi Wisata Prioritas tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kriteria, yang meliputi:

- a. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- c. Tersedia sumber daya pariwisata yang potensial menjadi daya tarik pariwisata nasional dan internasional;
- d. Memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau;
- e. Memiliki sarana penunjang yang relative sudah siap;
- f. Memiliki indeks rawan bencana yang rendah;
- g. Daerah yang memiliki daya beli yang baik;
- h. Memiliki tingkat kemudahan usaha yang baik;
- i. Pariwisata memberikan tingkat kontribusi dalam ekonomi lokal;
- j. Memiliki potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- k. Memiliki tren kedatangan wisatawan yang relative meningkat; dan
- l. Kesiapan dan dukungan masyarakat.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota terkait, bertekad mengembangkan tujuh destinasi wisata prioritas tersebut sebagai akselerasi pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Strategi pengembangan tujuh destinasi wisata prioritas tersebut, antara lain, melalui promosi dan pemasaran destinasi wisata; *branding*, penyelenggaraan *event* dengan mempertimbangkan kebutuhan dan segmentasi pasar, serta mengedepankan konten lokal dalam setiap promosi. Aksesibilitas dan infrastruktur pendukung tujuh kawasan dimaksud juga akan menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota terkait dan akan terus dikembangkan secara bertahap melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Produk industri kreatif yang tersebar pada tujuh destinasi wisata tersebut juga perlu dioptimalkan pengembangannya sebagai daya tarik bagi wisatawan di destinasi wisata.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara disusun berdasarkan nomenklatur dan kodefikasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021. 4 (empat) program prioritas urusan Pariwisata kemudian dijabarkan melalui 7 (tujuh) kegiatan serta 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja masing – masing Program. Penjabaran dari program dan kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dalam pengimplementasiannya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diwujudkan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
- c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

#### 2. Program Pengembangan Pemasaran

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

#### 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif; dan
- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 juga diselenggarakan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan memperhatikan potensi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata di Kabupaten/Kota tersebut. Selain melibatkan Kabupaten/Kota terkait, fokus pelaksanaan kegiatan juga melibatkan berbagai *stakeholder* pariwisata, seperti; instansi terkait, mitra pariwisata, pengelola destinasi wisata, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelola jasa usaha pariwisata, masyarakat dan sebagainya.

Selain itu, pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjalankan 1 (satu) program kesekretariatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mendukung kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan kepariwisataan oleh 4 (empat) program yang telah dijelaskan sebelumnya. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan penunjang, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara rinci, Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 3.6 dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara**

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
X	XX	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Kendari	100 Persen	5.044.728.000	APBD		100 Persen	5.296.964.000
X	XX	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kendari	3 Dokumen	252.386.000	APBD		3 Dokumen	265.006.000
X	XX	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kendari	14 Dokumen	177.873.000	APBD		14 Dokumen	186.767.000
X	XX	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendari	6 Dokumen	53.433.000	APBD		6 Dokumen	56.105.000
X	XX	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kendari	4 Laporan	132.010.000	APBD		4 Laporan	138.610.000
X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kendari	50 Laporan	1.703.964.000	APBD		50 Laporan	1.789.162.000
X	XX	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kendari	19 Unit	1.615.527.000	APBD		16 Unit	1.696.303.000
X	XX	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	Kendari	25 Laporan	373.651.000	APBD		25 Laporan	392.333.000
X	XX	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Kendari	35 Unit	735.884.000	APBD		35 Unit	772.678.000

3	26	02		<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan</b>	<b>Sultra</b>	<b>7,63 Hari</b>	<b>15.066.403.000</b>	<b>APBD</b>		<b>7,7 Hari</b>	<b>15.819.722.000</b>
3	26	02	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	Sultra	2 Lokasi	980.940.000	APBD		2 Lokasi	1.029.986.000
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	Sultra	2 Lokasi	13.576.564.000	APBD		2 Lokasi	14.255.392.000
3	26	02	1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha	Sultra	5 Industri	508.899.000	APBD		5 Industri	534.344.000
3	26	03		<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>	<b>Sultra/Luar Daerah</b>	<b>6.666.000 Wisatawan</b>	<b>4.087.090.700</b>	<b>APBD</b>		<b>6.732.660 Wisatawan</b>	<b>4.291.445.000</b>
3	26	03	1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah	Sultra/Luar Daerah	10 Laporan	4.087.090.700	APBD		10 Laporan	4.291.445.000
3	26	04		<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi/ Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Sultra/Luar Daerah</b>	<b>1 Usulan</b>	<b>1.695.960.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Usulan</b>	<b>1.780.758.000</b>
3	26	04	1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi	Sultra/Luar Daerah	5 Laporan	1.165.960.000	APBD		6 Laporan	1.224.258.000
3	26	04	1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Sultra	4 Dokumen	530.000.000	APBD		4 Dokumen	556.500.000
3	26	05		<b>Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina</b>	<b>Sultra</b>	<b>200 Orang</b>	<b>682.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>200 Orang</b>	<b>716.625.000</b>
3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	Sultra	200 Orang	682.500.000	APBD		200 Orang	716.625.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang berisikan program dan kegiatan, indikator kinerja program, pagu indikatif serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2024, sebagaimana terlampir di bawah ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Sumber Dana	Prakiraan Maju 2025			
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	Urusan Pilihan											
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
3	26		Dinas Pariwisata									
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	5.044.728.000	APBD	5.296.964.000	
3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	3 Dokumen	252.386.000	APBD	265.006.000	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	APBD	21.000.000
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	227.136.000	APBD	238.493.000
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.250.000	APBD	5.513.000
3	26	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	177.873.000	APBD	186.767.000	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	-	APBD	-
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	172.623.000	APBD	181.254.000
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.250.000	APBD	5.513.000

3	26	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	53.433.000	APBD	56.105.000
3	26	01	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	53.433.000	APBD	56.105.000
3	26	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	132.010.000	APBD	138.610.000
3	26	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	68.141.000	APBD	71.547.000
3	26	01	1.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	31.934.000	APBD	33.531.000
3	26	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	31.935.000	APBD	33.532.000
3	26	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Laporan	1.703.964.000	APBD	1.789.162.000
3	26	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.492.000	APBD	13.117.000
3	26	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000.000	APBD	525.000.000
3	26	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	APBD	420.000.000
3	26	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.055.000	APBD	62.008.000
3	26	01	1.06	05 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	68.141.000	APBD	71.548.000
3	26	01	1.06	06 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.489.000	APBD	21.513.000
3	26	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.787.000	APBD	72.226.000
3	26	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	575.000.000	APBD	603.750.000

3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	19 Unit	1.615.527.000	APBD	1.696.303.000
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	478.000.000	APBD	501.900.000
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	APBD	105.000.000
3	26	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	APBD	157.500.000
3	26	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	289.400.000	APBD	303.870.000
3	26	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	598.127.000	APBD	628.033.000
3	26	01	1.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	25 Laporan	373.651.000	APBD	392.333.000
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.743.000	APBD	2.880.000
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.236.000	APBD	217.597.000
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.672.000	APBD	171.856.000
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	35 Unit	735.884.000	APBD	772.678.000
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	59.590.000	APBD	62.570.000
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000	APBD	52.500.000
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	55.648.000	APBD	58.430.000
3	26	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.646.000	APBD	53.178.000
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	520.000.000	APBD	546.000.000

3	26	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan	7,63 Hari	15.066.403.000	APBD	15.819.722.000
3	26	02	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	2 Lokasi	980.940.000	APBD	1.029.986.000
3	26	02	1.01	02 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Dokumen	204.750.000	APBD	214.986.000
3	26	02	1.01	03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	776.190.000	APBD	815.000.000
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2 Lokasi	13.576.564.000	APBD	14.255.392.000
3	26	02	1.03	03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	230.685.000	APBD	242.219.000
3	26	02	1.03	04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	13.006.629.000	APBD	13.656.960.000
3	26	02	1.03	05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	89.250.000	APBD	93.713.000
3	26	02	1.03	06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Laporan	250.000.000	APBD	262.500.000
3	26	02	1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha	5 Industri	508.899.000	APBD	534.344.000
3	26	02	1.04	03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	200.000.000	APBD	210.000.000
3	26	02	1.04	04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	147.420.000	APBD	154.791.000
3	26	02	1.04	05 Fasilitas Standarasi Industri dan Usaha Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	161.479.000	APBD	169.553.000

3	26	03		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.666.000 Orang	4.087.091.000	APBD	4.291.445.000
3	26	03	1.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah	10 Laporan	4.087.091.000	APBD	4.291.445.000
3	26	03	1.01	01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	264.359.000	APBD	277.576.000
3	26	03	1.01	02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	3.682.894.000	APBD	3.867.039.000
3	26	03	1.01	03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	89.838.000	APBD	94.330.000
3	26	03	1.01	05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	50.000.000	APBD	52.500.000
3	26	04		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 Usulan	1.695.960.000	APBD	1.780.758.000
3	26	04	1.01	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi	5 Laporan	1.165.960.000	APBD	1.224.258.000
3	26	04	1.01	01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	200.000.000	APBD	210.000.000
3	26	04	1.01	02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Laporan	793.551.000	APBD	833.229.000
3	26	04	1.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan	172.409.000	APBD	181.029.000
3	26	04	1.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	4 Dokumen	530.000.000	APBD	556.500.000
3	26	04	1.02	01 Pengembangan Riset	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-
3	26	04	1.02	07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	200.000.000	APBD	315.000.000
3	26	04	1.02	09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	200.000.000	APBD	210.000.000
3	26	04	1.02	10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	30.000.000	APBD	31.500.000

3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	200 Orang	682.500.000	APBD	716.625.000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	200 Orang	682.500.000	APBD	716.625.000
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	311.850.000	APBD	327.442.000
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	113.400.000	APBD	119.070.000
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	50 Orang	133.400.000	APBD	140.070.000
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	123.850.000	APBD	130.043.000

## **Program dan Kegiatan Prioritas**

### **1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Dalam pengimplementasiannya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diwujudkan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata Sulawesi Tenggara sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
  - Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
- b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
  - Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
  - Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
  - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi.
- c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata;
  - Sub Kegiatan Kesiediaan Pelaku Usaha memenuhi Standar Usaha Pariwisata; dan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE).

### **2. Program Pengembangan Pemasaran**

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, terdiri dari sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri; dan
  - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

### 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dalam rangka menggali potensi produk kreatif Sulawesi Tenggara berbasis pariwisata berdasarkan sub sektor unggulan daerah, melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu:
  - Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik; dan
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.
- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, terdiri dari lima sub kegiatan, yaitu:
  - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
  - Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran.

#### 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, terdiri dari sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata;
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Sub Kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi/*Workplace Assesor* (WPA) Bidang Pariwisata; dan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun dalam rangka:

- a. Mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, yang diturunkan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai upaya pengembangan kepariwisataan Sulawesi Tenggara tahun 2024.
- b. Sebagai acuan bagi semua tingkatan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengaplikasikan kebijakan dan strategi maupun program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan; dan
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD.

Salah satu kendala dalam pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara adalah masih terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pengembangan pariwisata yang kemudian berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan di daerah. Strategi komunikasi promosi dan pemasaran pariwisata juga perlu dimaksimalkan. Pemerintah perlu mendorong pelaku industri digital untuk mengembangkan *platform* pariwisata, termasuk pengelola desa wisata juga didorong membuat *platform* digital dengan berbagai fitur yang menarik.

Untuk menjawab tantangan yang ada, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha melakukan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan yang diinginkan wisatawan dan stakeholder pendukung pariwisata, sehingga pelaksanaan pembangunan pada aspek pariwisata lebih berdaya guna serta tepat sasaran.

Catatan penting lain yang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah adalah memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dengan melaksanakan kegiatan yang benar – benar menyentuh kepada pengembangan kepariwisataan secara nyata, menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara akan menindaklanjuti segala masukan dari berbagai pihak tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Demikian dokumen Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan perencanaan daerah yang lebih baik ke depannya.

Kendari, Mei 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

**H. BELLI, S.E., M.Si**

NIP. 19800104 200803 1 002